



PEMKOT OPTIMALKAN PEMANTAUAN WILAYAH Pengawasan Jalur 'Tikus' Belum Diperlukan

YOGYA (KR) - Pemberlakuan prosedur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemda DIY mendapat dukungan Pemkot Yogya. Terutama dengan mengawasi pintu masuk wilayah DIY di daerah perbatasan. Hanya, pengawasan jalur tikus yang menuju Kota Yogya dinilai belum diperlukan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif Nugroho, mengungkapkan dengan pengawasan di pintu masuk ke DIY berarti setiap pendatang yang masuk Kota Yogya sudah diperiksa. "Tidak perlu sampai berlapis-lapis hingga mengawasi di jalan-jalan tikus. Justru kita tinggal menyelaraskan prosedur yang sudah diterapkan skala provinsi itu," jelasnya, Rabu (8/4).

Setiap kendaraan yang masuk ke Kota Yogya otomatis akan terawasi sejak dari pintu masuk atau perbatasan. Hal ini karena letak geografis Kota Yogya berada di tengah sehingga kendaraan sudah tersaring lebih awal.

Kendati demikian, imbuh Agus,

pihaknya tetap akan mengawasi armada atau transportasi umum yang masuk atau keluar di terminal maupun stasiun. Pengawasan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19 yakni dengan mengukur suhu tubuh setiap penumpang, melakukan pencatatan daerah asal dan tujuan serta prosedur operasional armada yang diberangkatkan.

"Kota Yogya ada Terminal Giwangan, Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Kita awasi yang di sana baik penumpang datang dan berangkat maupun armadanya. Bagi armada yang akan berangkat kapasitasnya maksimal 50 persen dari ketersediaan tempat duduk," urainya.

Kondisi penumpang di terminal maupun stasiun saat ini pun menurun drastis. Selain sudah tidak ada program mudik dari pemerintah maupun BUMN, sejumlah perusahaan armada juga memilih tidak memberangkatkan busnya. Begitu juga PT KAI yang sudah memangkas hampir semua perjalanan kereta jarak jauh.

Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan Kota Yogya guna mendukung prosedur PSBB Pemda DIY ialah dengan optimalisasi pemantauan di wilayah. Sudah ada gugus tugas hingga tingkat kelurahan yang melibatkan aparat RT, RW maupun komunitas. Setiap pendatang tidak luput dari pendataan sehingga bisa diawasi dengan baik.

"Survey dari Kementerian Perhubungan, 60 persen pekerja di Jabodetabek memilih tidak mudik. Sedangkan 40 persen mulai mendahului pulang. Ini yang kita pantau betul di titik kedatangan hingga tempatnya yang dituju," urainya. **(Dhi)-g**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005